



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) FINAL JASA KONTRUKSI PT HUTAMA KARYA PERSERO



MUHAMMAD BAYU NUSANTARA

NIM: 2005311012

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

TUGAS AKHIR

HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Program Pendidikan Diploma III
Politeknik Negeri Jakarta**

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2023

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Bayu Nusantara
NIM : 2005311012
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Jasa Konstruksi PT Utama Karya Persero.

Depok, 7 Agustus 2023

Pembimbing II

Risya Zahrotul Firdaus, S.I.Kom., M.Si

NIP. 198609082020122006

Pembimbing I

Kadunci, SE, M.Si

NIP. 195912271990031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Niaga

Dr. Dra. Iis Mariam., M.Si

NIP 196501311989032001

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Muhammad Bayu Nusantara
NIM : 2005311012
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Jasa Konstruksi PT Utama Karya Persero.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 7 Agustus 2023
Waktu : 09.00 - 10.00 WIB

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Kadunci, SE, M.Si
NIP : 195912271990031001
Penguji I : Riskon Ginting, S.E., M.Si
NIP : 196310161990031009
Penguji II : Riza Hadikusuma, M.Ag
NIP : 197404032001121002



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Jasa Konstruksi PT Utama Karya Persero”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan Diploma III Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini tentu tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Sc., Zainal Nur Arifin, Dipl. Ing. HTL., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Dra. Iis Maria, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta.
3. Taufik Akbar, SE., M.S.M, selaku Koordinator Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Politeknik Negeri.
4. Kadunci, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Materi tugas akhir yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan laporan tugas akhir ini.
5. Risya Zahrotul Firdaus, S.I.Kom., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Teknik Penulisan yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan laporan tugas akhir ini.
6. Bapak, Ibu Dosen beserta Staf Politeknik Negeri Jakarta khususnya Jurusan Administrasi Niaga yang telah banyak memberikan ilmu pembelajaran kepada penulis selama berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Bapak Muhroni selaku selaku *Executive Vice President* Divisi Akuntansi dan Keuangan PT Utama Karya Persero yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Utama Karya Persero.
8. Bapak Seno Aji sebagai pembimbing pada proses praktik kerja lapangan yang telah membimbing di instansi tempat penulis melakukan praktik kerja lapangan.
9. Rina Athiya, Bintang Bayu Kusuma, Prasetyo Bayu Kurniawan, Unggul Budy Prasetyo sebagai pembimbing teknis lapangan selama proses praktik kerja lapangan dan narasumber dalam melakukan penulisan tugas akhir ini.
10. Ayahanda Cecep dan Ibunda Rita, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secara moril, materil serta doa-doa yang selalu dipanjatkan hingga terselesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat, teman-teman, dan kerabat yang selalu membantu serta menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar laporan tugas akhir ini lebih baik dari sebelumnya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan laporan ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Depok, 16 Agustus 2023

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
1.5 Metode Pengumpulan Data	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pajak.....	6
2.1.1 Fungsi Pajak.....	7
2.1.2 Jenis Pajak.....	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2 Pajak Penghasilan.....	9
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan	9
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan.....	10
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final.....	12
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final	12
2.3.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final.....	13
2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final	14
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Jasa Konstruksi	15
2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi	15
2.4.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Jasa Konstruksi.....	16
2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Jasa Konstruksi	17

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.4.4	Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Jasa Konstruksi.....	17
2.4.5	Batas Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Jasa Konstruksi.....	18
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN		19
3.1	Sejarah Umum PT Utama Karya (Persero)	19
3.2	Visi Misi PT Utama Karya (Persero)	22
3.3	Tujuan Perusahaan PT Utama Karya (Persero).....	22
3.4	Budaya Perusahaan PT Utama Karya (Persero).....	23
3.5	Struktur Organisasi.....	23
3.6	Job Deskripsi Bagian Pajak.....	25
3.7	Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	25
3.8	Anak Perusahaan dan Afiliasi PT Utama Karya	26
3.9	Bidang Usaha PT Utama Karya	27
3.10	Produk Jasa Utama PT Utama Karya.....	28
BAB IV PEMBAHASAN		29
4.1	Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi PT Utama Karya	29
4.1.1	Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi PT Utama Karya.....	32
4.1.2	Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi PT Utama Karya.....	42
4.1.3	Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi PT Utama Karya.....	45
4.1.4	Melakukan Arsip.....	54
4.2	Hambatan dalam Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi PT Utama Karya.....	55
4.3	Solusi dalam Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi PT Utama Karya	55
BAB V PENUTUP		56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN		60



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo PT Utama Karya Persero.....	21
Gambar 3.2 Bakrie Tower	22
Gambar 3.3 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera	23
Gambar 3.4 Struktur Organisasi PT Utama Karya Persero	26
Gambar 3.5 Anak, Cucu, dan Afiliasi Perusahaan PT Utama Karya Persero... ..	27
Gambar 4.1 Bagan Alur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi PT Utama Karya.....	32
Gambar 4.2 Contoh Faktur Pajak PT Utama Karya	34
Gambar 4.3 Tampilan <i>Login Website DJP Online</i>	35
Gambar 4.4 Tampilan Menu <i>Website DJP Online</i>	36
Gambar 4.5 Tampilan Sub menu <i>Website DJP Online</i>	37
Gambar 4.6 Tampilan Pengisian Identitas Wajin Pajak yang Dipotong	38
Gambar 4.7 Tampilan Pajak Penghasilan yang Dipotong.....	38
Gambar 4.8 Tampilan Daftar Dokumen.....	39
Gambar 4.9 Tampilan Penandatanganan Bukti Potong	40
Gambar 4.10 Contoh Rekonsiliasi PPh Pasal 4 Ayat (2) PT Utama Karya	42
Gambar 4.11 Contoh Surat Setoran Pajak PT Utama Karya.....	44
Gambar 4.12 Tampilan <i>Login Website DJP Online</i>	46
Gambar 4.13 Tampilan Menu <i>Website DJP Online</i>	47
Gambar 4.14 Tampilan Sub menu <i>Website DJP Online</i>	48
Gambar 4.15 Tampilan Perekaman Bukti Penyetoran	49
Gambar 4.16 Tampilan Rekam Bukti Penyetoran.....	50
Gambar 4.17 Tampilan Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi	51
Gambar 4.18 Tampilan Lengkapi Lampiran & Penandatanganan.....	52
Gambar 4.19 Tampilan Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi	53
Gambar 4.20 Tampilan Rincian Laporan	53
Gambar 4.21 Tampilan Kirim SPT	54



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi	17
Tabel 4.1 Anggaran PPh Jasa Konstruksi PT Utama Karya Bulan April 2022	41
.....	





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	58
Lampiran 2 Invoice PT AMK.....	59
Lampiran 3 Bukti Potong PT AMK	60
Lampiran 4 Bukti Penerimaan Negara PT Utama Karya Persero	61
Lampiran 5 Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PT Utama Karya Persero.....	62





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ini diupayakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak yang mengalami kenaikan diharapkan dapat membayar pembelanjaan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan penerimaan tersebut, pemerintah selalu menciptakan kebijakan dalam peraturan perpajakan serta mendorong masyarakat untuk selalu melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Dari berbagai macam wajib pajak, usaha jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak yang selalu menerapkan sistem perpajakan serta tidak terlepas dari pembayaran pajak demi meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang pembangunan. Hal ini disebabkan jasa konstruksi termasuk dalam kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta memiliki peran penting dalam terwujudnya pembangunan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) mengenai Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi.

Jasa Konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Peraturan perpajakan mengenai pajak penghasilan atas jasa konstruksi mempunyai aturan yang pengenaan pajaknya berbeda dengan yang lain yaitu mengatur tentang pajak yang biasanya dikenakan pada wajib pajak badan lainnya. Peraturan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi lebih jelasnya pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2008 yang menetapkan bahwa setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atas usaha jasa konstruksi akan dikenakan pajak dan penghasilan tersebut juga akan dipotong pajak yang bersifat final yang diatur



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

dalam Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa objek penghasilan yaitu penghasilan yang berupa bunga deposito dan tabungan lain, surat utang negara, bunga obligasi, hadiah undian, persetujuan dan pembelian saham, penghasilan atas usaha jasa konstruksi dan sekuritas lain. Hal ini merupakan pajak yang bersifat final tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lain. Oleh karena itu, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi akan dikenakan tarif yang berlaku sekarang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2008 menjelaskan juga bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang bersifat final dipotong oleh pengguna jasa dan penyetoran disetor oleh pengguna jasa apabila pengguna jasa tersebut sebagai pemotong pajak. Untuk penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi memiliki batas waktu yaitu paling lama dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya bagi pengguna jasa dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah pembayaran diterima oleh pemberi jasa. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang sudah dipotong akan disetor ke bank dan penyetoran tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi mulai diberlakukan secara daring melalui DJP *Online* atau e-bupot unifikasi. Pada saat melakukan pelaporan pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dan apabila pelaporan tersebut dilakukan pada hari libur maka akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dalam setiap kategori usaha jasa konstruksi terdapat perbedaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) usaha jasa konstruksi. PT Utama Karya selaku penyedia jasa memiliki kewajiban sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) sesuai SOP perusahaan, PT Utama Karya akan melakukan validasi atas aspek perpajakan tagihan, menentukan tarif pajak, dan menghitung Pajak Penghasilan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

atas jasa konstruksi dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif yang sesuai Peraturan Pemerintah yang baru, yaitu PP Nomor 9 Tahun 2022 yang berarti akan dikenakan tarif sebesar 2,65% karena PT Utama Karya termasuk Pekerjaan Konstruksi Bersertifikat besar. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 yang berbunyi *“Tarif Pajak Penghasilan untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi atau sertifikat besar”*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul tugas akhir *“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Jasa Konstruksi Pada PT Utama Karya (Persero)”*. Penulis memilih judul tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) serta memberikan gambaran tentang mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang terjadi di PT Utama Karya (Persero).

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini, antara lain:

- a. Proses mekanisme dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final jasa konstruksi di PT Utama Karya
- b. Hambatan yang dihadapi selama proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final jasa konstruksi di PT Utama Karya
- c. Solusi dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final jasa konstruksi di PT Utama Karya



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan laporan tugas akhir ini antara lain:

- a. Untuk menjelaskan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final jasa konstruksi yang terjadi di PT Utama Karya (Persero).
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final jasa konstruksi pada PT Utama Karya (Persero).
- c. Untuk mengetahui solusi dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final jasa konstruksi pada PT Utama Karya (Persero).

1.4 Manfaat Penulisan

Dari penulisan laporan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

Bagi Penulis, sebagai media untuk melihat penerapan teori dari mata kuliah yang diterima, khususnya mata kuliah perpajakan. Dengan memperhatikan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PT Utama Karya (Persero).

Bagi Instansi, sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi instansi agar kedepannya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan atau referensi pembaca sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan aktivitas kerjanya.

Bagi Politeknik Negeri Jakarta, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa/mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, sekaligus menjadi referensi bagi penulis lainnya yang ingin mengetahui mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di suatu usaha jasa konstruksi.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pada metode penelitian ini akan menguraikan mengenai tahapan yang akan digunakan dalam penulisan Tugas Karya Akhir. Bab ini menjelaskan tentang penggunaan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dimana metode ini akan dilakukan analisa data/dokumen. Metode tersebut melalui 4 tahap kegiatan yaitu:

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara seperti pada lampiran 1 dengan menanyakan secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan pimpinan khususnya berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi.

b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan dan mendokumentasikan data yang berkaitan dengan mekanisme pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) final jasa konstruksi.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan sebelumnya yang dilaksanakan penulis di PT Utama Karya Persero dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Jasa Konstruksi di PT Utama Karya Persero, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh bagian pajak di PT Utama Karya sudah baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan dimulai dengan menerima dokumen penagihan dari vendor. Melakukan validasi terhadap tagihan tersebut. Membuat bukti potong pada *Website* DJP *Online*. Membukukan hutang Pajak Penghasilan dan merekapitulasi anggaran selama 1 (satu) bulan berjalan. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi antara bagian pajak dan bagian akuntansi. Setelah itu bagian keuangan wajib menyetorkan PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi ke Negara. Setelah disetorkan, bagian pajak melaporkan pajaknya dengan membuat SPT Masa PPh di *Website* DJP *Online*.
- b. Dalam melakukan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi di PT Utama Karya terdapat beberapa hambatan yaitu sulitnya menentukan tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi dikarenakan banyak yang tidak melampirkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), dan salah pembukuan yang seharusnya PPh 23 atau 22 tetapi tercatat di PPh Pasal 4 Ayat 2.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c. Dalam menangani hambatan yang terjadi, PT Utama Karya terus memberikan usaha yang maksimal dengan menghubungi kembali vendor untuk dikirimkan lampiran SIUJK dan memastikan kembali pencatatan utang PPh apakah sudah sesuai atau belum.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk PT Utama Karya Persero dalam proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya perusahaan menekankan dan mengingatkan kembali kepada vendor-vendor agar tidak lupa untuk melampirkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Hal tersebut akan membuat pekerjaan menjadi tertunda karena menunggu dikirimkan kembali SIUJK tersebut.
- b. Sebaiknya perusahaan lebih teliti kembali terhadap pembukuan yang dilakukan dan meminta untuk karyawan lain agar mengeceknya berulang kali, karena untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Puji. (2019). *Mahir Praktik Perpajakan Bendahara Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bendahara Edisi 2019*. Jakarta: WIKeupedia.
- Alamanda, Amelia Risky dkk. (2022). *Pengantar Perpajakan*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Dahlan, Ahmad dkk. (2022). *Akuntansi Perpajakan Berdasarkan SAK dan UU serta Peraturan Perpajakan terbaru*. Solok: CV. Mitra Cendekia Media.
- Lihin, Agus. Susanto., & Hendra. Wijana. (2019). *Pajak Menjawab! Kupas Tuntas Persoalan Pajak di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Ratnawati, Juli., & Retno, Indah. Hernawati. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 4881. Jakarta.
- Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 6767. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran RI Tahun 2007 No. 85. Jakarta: Sekretariat Negara.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran RI Tahun 2008 No. 133. Jakarta: Sekretariat Negara.

Hutama Karya. Gambaran Umum Perusahaan. Diakses pada April 17, 2023. dari <https://www.hutamakarya.com/>

KPPN Kotabumi. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Diakses pada Maret 14, 2023. dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/ph-pasal-4-ayat-2.html>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi di PT Utama Karya Persero?
2. Bukti potong yang akan diberikan kepada vendor itu dibuatnya kapan?
3. Boleh dijelaskan apa itu Surat Setoran Pajak (SSP) dan kapan SSP tersebut dibuat?
4. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) itu buat apa?
5. Hambatan apa saja yang biasanya dihadapi dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi di PT Utama Karya Persero
6. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi di PT Utama Karya Persero

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Invoice PT AMK

INVOICE/FAKTUR PENJUALAN

No. Invoice : 0176-1/INV-AMK/HK UPI/V/2022
 Kepada : PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung
 Alamat : Jl. Letjen MT. Haryono Kav No.8, RT.012/RW.011, Cpinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta

No	Nama Barang	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah
1	Pekerjaan dan Pengadaan Platfond	1	ls	452.700,000	452.700,000
				Retensi 5%	22.635,000
				Jumlah	430.065,000
				PPN 11%	47.307,150
				Jumlah Tagihan	477.372,150
				PPH 2,65%	11.398,722
				PPN WAPU	47.307,150
				Jumlah Yang Dibayarkan	418.668,278

Tertitaho : Empat Ratus Delapan Belas Juta Rupiah Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah

Sesuai Dengan :
 Surat Perjanjian : HK.DG/AL.0176/SPP/06/V/2022 / 26 Januari 2022 /
 Surat Perjanjian Addendum 1 : HK.DG/AL.0176/SPP/06/ADD.I/IV/2022 / 25 April 2022 /
 Berita Acara Prestasi Pekerjaan : 0176 - 1 / HK-UPI / BAPP / V / 2022 / 10 Mei 2022 /
 Nama Proyek : Proyek GD. Universitas Pendidikan Indonesia CWP-02, Bandung /

Pembayaran Ke Rekening :
 Bank : BNI - Cab. Kelapa Gading /
 No. Rekening : 526.657.588.8 /
 Atas Nama : PT. Amsalindo Maha Karya /

Bandung, 14 APRIL 2022
 PT. Amsalindo Maha Karya



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Sumber: Dokumentasi PT Utama Karya Persero, 2022



Lampiran 4 Bukti Penerimaan Negara PT Hutama Karya



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Pajak

Nama Bank	Kementerian Keuangan		
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk			
Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	: 10/05/2022 11:19:16	NTB	: 00000305777
Tanggal Buku	: 10/05/2022	NTPN	: B6D0003ISGLGSC1G
Kode Cabang	: 0989-BNI 46	STAN	: 648873
Data Setoran :			
Kode Billing	: 126324300460080		
NPWP	: 01.001.611.1.093.000		
Nama Wajib Pajak	: PERUSAHAAN PERSEPOAN (PERSERO)		
Alamat	:		
Nomor Object Pajak	: 000000000000000000		
Mata Anggaran	: 411128		
Jenis Setoran	: 409		
Masa Pajak	: 04042022		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 671.949.217,00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: # Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah #		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


Sumber: Dokumentasi PT Hutama Karya Persero, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PT Utama Karya

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN	FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> - <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____ H.4	

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP : **XX XXX XXX X XXX XXX**
 A.2 NAMA : **PT.HK**
 A.3 ALAMAT : _____
 A.4 NO.TELEPON : _____

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI				
1	PASAL 4 AYAT (2)	450.000,00	0,00	450.000,00
2	PASAL 15	0,00	0,00	0,00
3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	450.000,00	0,00	450.000,00
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN				
4	PASAL 22	2.068.005.677,00	0,00	2.068.005.684,00
5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00
6	PASAL 23	672.665.537,00	0,00	672.665.554,00
7	PASAL 4 AYAT (2)	12.346.365.375,00	0,00	12.346.365.541,00
8	PASAL 15	0,00	0,00	0,00
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	15.087.036.589,00	0,00	15.087.036.779,00
III. REKAPITULASI PPh				
10	JUMLAH TOTAL PPh	15.087.486.589,00	0,00	15.087.486.779,00
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN			0,00
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN			0,00

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.6 QR Code : 

C.2 KUASA WAJIB PAJAK

C.3 NAMA : _____

C.4 TANGGAL : **XX XX XXXX** dd-mm-yyyy

C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.

Sumber: Dokumentasi PT Utama Karya Persero, 2022